

Banten 23 Tahun, Lebak Butuh Perhatian Khusus

SERANG (IM) - Provinsi Banten pada 4 Oktober 2023 nanti akan memasuki usia 23 tahun. Usia itu menjadi tanda sejarah pemisahan antara Provinsi Banten dengan Jawa Barat pada tahun 2000 lalu.

Usia itu tidak lagi muda, namun Banten masih menyisakan banyak pekerjaan rumah (PR) salah satunya yakni pemerataan pembangunan.

Ketua Komisi II DPRD Banten, Iip Makmur menerangkan bahwa saat ini masih ada disparitas pembangunan antara wilayah Banten Utara dengan Banten Selatan.

“Dirgahayu Banten yang ke-23, semoga Banten menjadi lebih baik, lebih maju, lebih sejahtera. Semoga di usia yang tidak lagi muda ini Banten bisa menyelesaikan permasalahan pembangunan yang kini masih belum merata khususnya di Banten Selatan,” kata Iip, Senin (2/10).

Iip menerangkan, Banten Selatan khususnya Kabupaten Lebak saat ini masih tertinggal dan sangat butuh perhatian khusus baik itu Pemerintah Pusat maupun Provinsi Banten.

Menurutnya, Kabupaten Lebak masih terbelit dengan masalah pembangunan sa-

rana dan infrastruktur yang masih lah sangat tertinggal dibandingkan dengan wilayah Banten Utara.

“Infrastruktur jalan, jembatan, lapangan kerja dan investasi merupakan sederet masalah yang tengah dihadapi Kabupaten Lebak,” kata Ketua DPD PKS Lebak ini.

Padahal, kata Iip, Lebak merupakan daerah yang memiliki luas sepertiga Provinsi Banten. Dengan luas itu, Lebak sangatlah kaya akan sumber daya alam, dan wisata yang dapat menjadi sumber potensi pendapatan untuk Provinsi Banten.

Pria yang digadang sebagai bakal calon Bupati Lebak 2024-2029 ini pun berharap kepada Pemprov Banten memberikan perhatian khusus untuk Kabupaten Lebak agar dapat bisa tumbuh berkembang menjadi daerah maju menyaingi daerah lainnya.

“Lebak memang perlu perhatian khusus agar memang Banten bisa setara dengan Provinsi lain. Jadi Banten dengan luas wilayah, kemudian juga jumlah penduduk miskinnya yang lebih banyak, maka perlu ada perhatian khusus untuk Lebak agar sekali lagi bisa mengejar ketertinggalannya dengan kabupaten kota yang lain,” pungkasnya. ● **pra**

Puluhan Pedagang Pasar Minta DPRD Berdiri Bersama Rakyat



Puluhan pedagang Pasar Kotabumi minta DPRD berdiri bersama Rakyat.

TANGERANG (IM) - Pasca tragedi kerusuhan berdarah pekan lalu, puluhan pedagang pasar Kotabumi, Kecamatan Pasarkemis mengadakan nasibnya ke DPRD Kabupaten Tangerang, Senin (2/10).

Selain mendesak pembatalan revitalisasi pasar, mereka juga meminta DPRD berdiri bersama rakyat dalam mengambil langkah-langkah konkrit agar keamanan dan kenyamanan mereka dalam berdagang terjamin.

Mereka juga menyerahkan surat terbuka kronologi atas kejadian berdarah yang terjadi pada beberapa pekan lalu.

Dalam surat tersebut, tragedi berdarah yang menelan korban luka-luka telah menyebabkan trauma mendalam sehingga muncul kekhawatiran akan terjadi tragedi susulan.

Kekhawatiran tersebut bukan tanpa alasan, pasalnya menurut para pedagang kejadian tragedi berdarah yang disertai dengan pengerusakan dan penjarahan tersebut sebelumnya sudah dilaporkan, namun kurang mendapat respon positif dari aparat penegak hukum sehingga bentrokan tidak dapat dihindari.

“Saya meminta / bantuan perlindungan / bantuan kepada Polres dan Polsek, Babinsa Pasar Kemis melalui WA,” tulis Priyanto salahseorang perwakilan pasar dalam surat terbuukanya.

Dalam surat terbuukanya, Priyanto bahkan sempat memberikan informasi titik berkumpul para preman yang melakukan penyerangan pada tragedi berdarah itu namun polisi dan TNI tidak ada satupun di lokasi saat kejadian untuk melindungi kami masyarakat pedagang,” tukasnya.

Dengan demikian dirinya menilai perlu DPRD Tangerang segera membentuk Tim Investigasi Independen untuk mengusut

tuntas peristiwa Tragedi Berdarah, perusakan, penjarahan yang terjadi di Pasar Kuta Bumi pada tanggal 24 september 2023 sampai terang benderang.

“Batalan rencana Revitalisasi / Pembangunan Pasar Kuta Bumi karena rencana tersebut semata-mata hanya merupakan pemaksaan kehendak untuk keuntungan pribadi dan kelompok dengan cara-cara rekayasa data-data dan cara-cara premanisme,” jelasnya.

“Kami minta perpanjangan izin pemakaian ruang dagang karena kondisi bangunan masih sangat layak, Batalan rencana Revitalisasi / Pembangunan Pasar Kuta Bumi karena rencana tersebut semata-mata hanya untuk keuntungan diri pribadi dan kelompok,” tulis surat terbuka tersebut.

Perwakilan Pedagang Pasar Kuta Bumi juga meminta kepada Bupati dan DPRD Tangerang mencopot Direksi dan Dirop Perurnda NKR Tangerang karena dinilai tidak busus dalam mengelola pasar, khususnya pasar Kuta Bumi.

Bukan cuma itu, dirinya juga mendesak Perumda yang diduga kuat bertanggung jawab atas kejadian berdarah tersebut menanggung biaya pengobatan warga yang terluka dan biaya perbaikan kerusakan meja-meja dan kios-kios yang disebabkan tragedi tersebut.

Dalam kesempatan itu, Wakil ketua DPRD Kabupaten Tangerang, H. Astayudin SE mengaku akan menindaklanjuti apa yang menjadi keluhan masyarakat tidak ada satupun di lokasi saat kejadian untuk melindungi kami masyarakat pedagang,” tukasnya.

Dengan demikian dirinya menilai perlu DPRD Tangerang segera membentuk Tim Investigasi Independen untuk mengusut



BMKG PREDIKSI AWAL MUSIM HUJAN

Petugas Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) membaca termometer pengukur suhu udara di Laboratorium terbuka BMKG Banten di Serang, Senin (2/10). BMKG memprediksi musim kemarau di sebagian besar wilayah Indonesia akan berlangsung hingga akhir Oktober dan awal musim hujan terjadi pada awal November 2023.

JELANG BERAKHIRNYA MASA JABATAN

Arief Minta ASN Jangan Terjebak Propaganda

Arief mengatakan, jelang berakhirnya masa jabatan Walikota Tangerang yang akan berlangsung pada 26 Desember 2023 mendatang, ia meminta ASN agar tidak terpancing akan propaganda yang disebar oleh orang tak bertanggung jawab di media sosial.

TANGERANG (IM) - Wali Kota Tangerang, Arief R Wisnansyah meminta seluruh aparatur sipil negara (ASN) di

Kota Tangerang tidak terjebak dalam propaganda jelang Pemilihan Wali Kota Tangerang 2024 mendatang. Permintaan tersebut

disampaikan Arief agar suasana kondusifitas di lingkungan pegawai tetap terjaga.

Arief mengatakan, jelang berakhirnya masa jabatan Walikota Tangerang yang akan berlangsung pada 26 Desember 2023 mendatang, ia meminta ASN agar tidak terpancing akan propaganda yang disebar oleh orang tak bertanggung jawab di media sosial.

Untuk itu, Arief meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) Kota Tangerang gencar melakukan sosialisasi agar situasi kon-

disitas tetap terjaga. “Saya minta kepada seluruh OPD agar gencar melakukan sosialisasi,” ujarnya, Senin (2/10).

Arief mengatakan, dengan sosialisasi tersebut diharapkan jiwa korsa dan semangat mengedepankan profesionalisme pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan oleh para pegawai. Meskipun, saat ini para ASN sudah mendapatkan haknya dalam Pemilu 2024 mendatang.

“Itu kan sudah jiwa korsanya ASN. Jadi mudah mudahan semangat profesionalitas

dikedepankan dan semua bisa berjalan sesuai dengan biasanya,” tambahnya.

Menurutnya, di usia Kota Tangerang yang sudah beranjak 30 tahun ini sudah tidak perlu diragukan lagi mengenai masalah netralitas pegawai dalam menghadapi pemilihan umum.

“Saat ini usia Kota Tangerang yang sudah menempuh 30 tahun ini sudah tidak perlu diragukan lagi dalam melaksanakan tugas pemerintahan secara profesional dan secara netral,” pungkasnya. ● **pp**

MULTAZAM TERPILIH JADI KETUA UMUM

Alumni Ika Kapal Undip Dorong Kemandirian Industri Maritim Nasional



Musyawarah Nasional (Munas) IV Ikatan Alumni Teknik Perkapalan (Ika Kapal) Undip menetapkan Multazam sebagai ketua umum terpilih dalam sidang Munas di Mercure Grand Mirama Surabaya, Sabtu (30/9).

SURABAYA (IM) - Musyawarah Nasional (Munas) IV Ikatan Alumni Teknik Perkapalan (Ika Kapal) Undip menetapkan Multazam sebagai ketua umum terpilih. Dalam sidang Munas di Mercure Grand Mirama Surabaya, Sabtu (30/9), Multazam mendapat dukungan dari kandidat kuat lain, yaitu Kukuh Wardhana, David Ali Jufri, dan Andhi Prasetyo.

Munas yang diikuti 305 alumni tersebut semula diperkirakan bakal alot karena munculnya kandidat kuat ketua umum mewakili elemen alumni Pendidikan Ahli Teknologi, Fakultas Non-Gelar Teknologi, Program Diploma, S-1, dan sekolah vokasi. Namun, dalam pemaparan visi-misi calon ketua umum, kandidat lain ternyata memberikan dukungan penuh kepada pengusaha galangan kapal Pontianak tersebut.

“Terima kasih atas amanah ini. Mari bersama kita bergandeng tangan memajukan Ika Kapal Undip,” ujar Multazam usai terpilih dan menerima bendera kebesaran Ika Kapal dari ketua umum sebelumnya, Ari Wickasono. Prosesi ini disaksikan Ketua Bidang Maritim Ika Undip,

Ari Rochmat. Dalam sidang Munas yang dipimpin Suyoto, Gusminar, Suhartono Sanjoto, Pawestri, dan Syahril Aman tersebut, peserta Munas juga menyepakati perubahan AD/ART yang menumpukkan pada organisasi yang ramping namun memiliki daya jelajah tinggi. “Salah satunya adalah mengubah pengurus wilayah menjadi Korwil, yang termasuk dalam pengurus DPP,” tandas Multazam.

Perubahan mendasar juga dilakukan dengan memberikan otonomi penuh kepada korwil untuk membentuk organisasi di tingkat wilayah. “Saya berharap, perubahan ini akan lebih memberi keleluasaan kepada korwil untuk menggerakkan kegiatan wilayah. Karena korwil adalah pengurus DPP maka seluruh kebijakan organisasi akan langsung sampai ke tingkat wilayah sehingga jauh lebih efektif,” lanjutnya.

Kemandirian Industri Maritim

Sebelum Munas, digelar seminar nasional dengan tema “Prospek Kebutuhan Armada Kapal di Indonesia untuk Kebangkitan dan Kemajuan Industri Maritim Nasional”.

Seminar menghadirkan Andi Komara (Ketua Tim Kerja Industri Maritim Kemenperin), Laksda TNI (Purn), Mulyadi (Staf Ahli Komite Kebijakan Industri Pertahanan Bidang Pertahanan Laut), M Irfan Zainul Fikri (Direktur Armada PT Pertamina Shipping), dan Aris Wacana Putra (Kepala Divisi Perencanaan Strategis Perusahaan PT PAL Indonesia).

Ketua DPP Ika Undip, Abdul Kadir Karding menyatakan, Munas ini adalah momentum untuk terus berpikir agar alumni Teknik Perkapalan Undip dapat memberikan kontribusi lebih pada perkembangan industri maritim nasional. “Problem kita kan hampir seluruh kapal adalah kapal impor, baik kapal baru maupun bekas,” ujar anggota DPR RI ini. “Tengaga kerja kita bagus, penguasaan teknologi bagus. Problemnya hanya di bahan baku,” tegasnya.

Saat ini, perlu regulasi yang tegas agar industri maritim nasional dapat berkembang dan dapat diandalkan. “Kami di DPR mendorong agar regulasi zero emission carbon dapat diterapkan. Yang boleh masuk ke perairan Indonesia hanya kapal yang memenuhi syarat emisi karbon,” lanjutnya.

Seluruh pembicara menyatakan, industri perkapalan dalam negeri sebenarnya cukup mumpuni dan mampu mengerjakan proyek berskala internasional. Hal ini dibuktikan dengan pesanan kapal berbagai jenis dari luar negeri. Namun, di sisi lain, sejumlah kapal pesanan dalam negeri masih dikerjakan di luar negeri. “Karenanya, seminar ini diharapkan menghasilkan sinergi positif antara pemesan kapal dan industri perkapalan sehingga kebutuhan kapal dalam negeri dapat terus berkembang. Kami mendorong terciptanya kemandirian industri maritim nasional,” ujar Ketua Panpel Andhi Prasetyo. ● **yan**

Pemkot Tangerang Imbau Pegawai Respons Potensi Bencana Kekeringan

TANGERANG (IM) - Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang mengeluarkan imbauan kepada seluruh pegawai untuk merespons potensi bencana kekeringan sebagai dampak kemarau, dengan melakukan tindakan di lapangan, seperti penyediaan air bersih.

Asisten Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Tangerang, Deni Koswara, di Tangerang, Senin (2/10), mengatakan potensi bahaya dari dampak kekeringan seperti kekurangan ketersediaan air bersih, kebakaran semak, lahan, dan permukiman, sampai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan industri, perkantoran, bahkan pemerintahan.

Oleh karena itu Pemkot Tangerang mengimbau kepada seluruh pegawai untuk terus melakukan langkah-langkah konkrit dalam mengantisipasi meliputi pemantauan, peninjauan lapangan, edukasi, serta penghematan air di lingkungan masing-masing.

Misalnya saja, kata dia, Dinas Kesehatan melakukan sosialisasi dan pelayanan kesehatan yang relevan, Dinas Perkim menyediakan tangki air di permukiman, DKP memastikan ketersediaan pangan, BPBD memastikan kesiapsiagaan kedaruratan, Perumda Tirta Benteng memastikan air bersih, serta

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya berdasarkan kewenangan masing-masing.

Ia melanjutkan Pemkot Tangerang juga menekankan upaya antisipasi kekeringan dan kekurangan air bersih dalam bentuk penyiapan logistik di lingkungan yang membutuhkan berdasarkan pertimbangan pemetaan yang telah dilakukan.

Penyiapan logistik tersebut dapat dilakukan dalam bentuk penyediaan tangki air bersih, pompa air, dan peralatan-peralatan lainnya yang dibutuhkan. Imbauan ini, kata dia, juga mendorong koordinasi antar-pemangku kepentingan dapat secepatnya dilakukakan dalam mewujudkan persiapan mekanisme yang terukur.

“Mulai dari tiap OPD sampai yang di tingkat kewilayahan dapat melakukan persiapan, mempelajari rencana kontingensi, dan penyiapan rencana aksi yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan setempat,” ucapnya.

Selain itu Pemkot Tangerang juga mengimbau kesiapsiagaan ini dilakukan dengan memanfaatkan sistem informasi yang selama ini telah terintegrasi dengan baik di Kota Tangerang.

“Hal ini dilakukan untuk mendorong pelaksanaan langkah-langkah antisipasi dapat berjalan efektif dan efisien,” katanya. ● **pp**